

SPPD Tak Lagi Jadi “Tambahannya Pendapatan”

Perjalanan dinas keluar daerah, baik yang dilakukan eksekutif⁽¹⁾ dan legislatif⁽²⁾, biasanya menjadi “tambahan penghasilan” bagi PNS dan anggota DPRD. Namun sejak April 2013 nantinya, SPPD tidak akan lagi menjadi “tambahan penghasilan”. Kenapa? *Real cost* yang di tahun 2012 hanya diberlakukan untuk biaya transportasi saja, dimulai April tahun ini, semua pengeluaran perjalanan dinas, baik transportasi, penginapan dibayarkan sesuai *real cost*.

Akhmad Yani, SE, Sekretaris DPPKAD Muna mengungkapkan, pemberlakuan *real cost* di Muna sudah diberlakukan sejak tahun 2012. Namun baru khusus untuk biaya transportasi. “Biaya hotel masih dibayarkan secara merata, berdasarkan klasifikasi eselonnya, “ujarnya.

Mulai April, kata Dia, semua biaya perjalanan dinas, termasuk di dalamnya transportasi dan hotel akan diberlakukan *real cost*. “Dibayarkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan saat melakukan perjalanan dinas,” tukasnya.

Akhmad Yani kemudian mencontohkan, pagu anggaran perjalanan dinas untuk pagu anggaran hotel dan makan pejabat eselon II B ke daerah luar Sultra sebesar Rp1,5 juta per hari. Dalam perjalanannya, pejabat yang melakukan perjalanan dinas untuk biaya hotel mengeluarkan anggaran Rp 500 ribu per hari. “Sisa dananya Rp 1 juta dikembalikan ke kas daerah.

Kesimpulannya, bila pertanggungjawabannya tidak sesuai, kelebihan dikembalikan,” tukasnya. Begitu halnya transportasi, yang sejak 2012 sudah diberlakukan *real cost*.

Pemberlakuan *real cost* kata Dia, berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, yaitu Perubahan atas Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013. Di mana isinya, khusus perjalanan dinas itu diterapkan *real cost* terhitung sejak April nanti, akan diatur dalam SK Bupati. “Paling lambat SK Bupati keluar 1 April,” sebutnya.

Sumber :

Kendari Pos (13 Maret 2013)

-
- (1) Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum.
 - (2) Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.